

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
(RENJA OPD)**



**KECAMATAN MATESIH
TAHUN 2022**

Alamat : Jl. TP Joko Songo Matesih Kode Pos 57781
No. Telp./Fax (0271) 662737

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

Matesih, November 2021
CAMAT MATESIH

ARDIANSYAH, S.STP,MM.
Pembina
NIP. 19790709 199810 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih.....	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	29
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Prioritas dan Plafon anggaran sementara	42
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Kecamatan Matesih berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Kecamatan Matesih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Tengan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023.
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Matesih disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Matesih, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Matesih.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Matesih, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

MATESIH TAHUN 2021

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Matesih tahun lalu (2021).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Matesih

Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

MATESIH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Matesih berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan realisasi APBD Kecamatan Matesih.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2013-2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih dan Pencapaian Renstra

Kecamatan Matesih s/d Tahun 2021 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Matesih

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100	100	100	99	99	100	300	3
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jas Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik		75	100	89	89			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor		100	100	100	100			
	Penyediaan Alat Tulis	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100	100	100	100			

	Kantor									
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan		100	100	100	100			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Bangunan Kantor		100	100	100	100			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang Undangan		100	100	100	100			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		100	100	100	100			
	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar daerah	Tersedianya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar daerah		100	100	100	100			
	Penyediaan Logistik Dan Perlengkapan Rumah Dinas	Tersedianya Logistik Dan Perlengkapan Rumah Dinas		100	100	100	100			
	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan		100	100	100	100			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		92	100	99	99	100		
	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor		92	100	92	92			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100	100	100	100			
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur		99	-	-	-			

	Pengadaan Komputer	Tersedianya Pengadaan Komputer		99	-	-	-			
	Pemeliharaan Rutin / Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / Gedung Kantor		100	-	-	-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasioanl		98	100	96	96			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		100	100	100	100			
	Pemeliharaan komputer	Terpeliharanya komputer		100	100	100	100			
	Penataan Halaman Kantor	Terpeliharanya penataan halaman kantor		-	100	99	99			
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		94	100	100	100			
	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		85	-	-	-			
	Penyusunan Renstra OPD	Kegiatan Penyusunan LKJIP		100	-	-	-			
	Penyusunan Renja	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Renja		-	100	100	100			
4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	CAKUPAN PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		100	-	-	-			
	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	Pembinaan Linmas/Kamtibmas		100	-	-	-			
	Kegiatan Pembinaan	Kegiatan Pembinaan		100	-	-	-			

	Wilayah/Daerah	Wilayah/Daerah								
	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum		100	-	-	-			
5	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	CAKUPAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		100	-	-	-			
	Fasilitasi Kegiatan PATEN	Fasilitasi Kegiatan PATEN		100	-	-	-			
6	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN	CAKUPAN PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN		100	-	-	-			
	Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kecamatan		100	-	-	-			
	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan		99	-	-	-			
	Fasilitasi Sosial Budaya	Fasilitasi Sosial Budaya		100	-	-	-			
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	CAKUPAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	-	-	-			
	Pembinaan PKK Kecamatan	Pembinaan PKK Kecamatan		100	-	-	-			
8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	CAKUPAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		100	-	-	-			
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		100	-	-	-			
	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa		100	-	-	-			
7	PROGRAM PENINGKATAN	CAKUPAN PENINGKATAN		100	-	-	-			

	KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA								
	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa		100	-	-	-			
	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa		100	-	-	-			
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH	CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH			100	100	100			
	Fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketentraman	Fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketentraman			100	100	100			
	Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Umum	Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Umum			100	100	100			
	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial			100	100	100			
	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat			100	100	100			
	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan			100	100	100			
7.01. 01.2. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							100	
7.01. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							69,16	
7.7.0 1.01.	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan							92,13	

2.06.01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							80,44	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor							86,76	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan							96,09	
7.01.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan							75,00	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan							59,03	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minuman rapat serta pembiayaan konsultasi SKPD							60,55	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							100	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							74,97	
	Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa							76,98	

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor							75,00	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							68,30	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							50,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pengerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pengerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							50,00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat, Terlaksananya kegiatan legalisasi							50,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							62,64	

	KELURAHAN									
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Persentase kehadiran musrenbang							73,60	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							73,60	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif							63,83	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							63,83	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							159,19	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif							159,19	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Matesih							159,19	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fas keg Pelaks daerah,keg FKUB,Keg Paskibaraka, Fasilitasi Kegiatan Daerah							27,01	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pesentase wilayah tertib Perda								
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI							54,70	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya							0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan admn desa, fasilitasi dana desa, keg monitoring dan evalauasi							47,62	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan							30,60	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa							30,60	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tercapainya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan Matesih							69,38	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

Kecamatan Matesih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Matesih dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Matesih meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa

- Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
- Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
- Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
- Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
- Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih cukup banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif

- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Matesih berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai Sakip	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	NA	65	67	69	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	NA	70	72	74	75

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Karanganyar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Karanganyar;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19. Muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;
- e. Pandemi Covid-19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita Covid-19 semakin tinggi. Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Matesih, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Matesih yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Matesih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
			masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
2	Wabah Pandemi COVID-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19	a. <i>Corona Diseases</i> adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya	a. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan Covid sejak awal Maret 2020 b. PSBB segala aspek kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan Covid-19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. c. Salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
			keamanan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Matesih berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Matesih.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai prodses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.dapat dijelaskan pada tabel T-C 31

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat daerah Kecamatan Matesih

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Matesih	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	100	2.419.138.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Matesih	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	100	2.256.904.000	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Matesih	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	13.000.000	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Matesih	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	5.000.000	
	administrasi keuangan	Kec. Matesih	Cakupan administrasi keuangan	100	2.030.920.100	administrasi keuangan	Kec. Matesih	Cakupan administrasi keuangan	100	1.714.646.000	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Matesih	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	130.497.900	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Matesih	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	65.980.000	
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	170.720.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	161.800.000	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	61.000.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	22.000.000	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Matesih	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	100	6.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Matesih	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	100	2.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kec. Matesih	Cakupan PenyelenggaraanU rusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	100	6.500.000	PenyelenggaraanU rusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kec. Matesih	Cakupan PenyelenggaraanU rusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	100	2.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Matesih	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	23.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Matesih	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	17.720.000	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Matesih	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	100	8.500.000	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Matesih	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	100	5.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Matesih	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	15.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Matesih	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	12.720.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Matesih	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100	42.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Matesih	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100	235.840.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Matesih	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	100	42.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kec. Matesih	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	100	235.840.000	

			Ketertiban Umum			Ketentraman dan Ketertiban Umum		Ketertiban Umum			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Matesih	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	30.000.0000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Matesih	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	23.000.000	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Matesih	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	30.000.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Matesih	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	23.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Matesih	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	15.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Matesih	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	9.100.000	
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Matesih	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	15.000.000	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Matesih	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	9.100.000	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Matesih maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel T-C.32
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Matesih

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME
1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ADD, Pajak dan Retribusi, Dana Desa dan Bantuan Keuangan (BANKEU) Kabupaten dan Provinsi Tahun2022	Seluruh Desa di Kecamatan Matesih	Terlaksananya kegiatan Monitoring di 9 Desa di Kecamatan Matesih	20.000.000
2	Pengisian Perangkat Desa	Kecamatan Matesih	Terisinya Perangkat Desa	5.000.000
3	Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Desa Ngadiluwih	Terpilihnya Kedala Desa	5.500.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Matesih

1. Tujuan

Tujuan merupakan perjalanan misi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Matesih yaitu ***Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik.***

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kantor Kecamatan Matesih yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Matesih yaitu ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

3. Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan Mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Matesih terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1. berjuang, 2. bersama, 3. memajukan, 4. Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola

pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi,

penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Matesih mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Matesih adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Matesih dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Matesih Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 -2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Tujuan Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik Sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Matesih Tahun 2022 ada 6 Program dan 11 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b) Administrai Keuangan
 - c) Administrasi umum perangkat daerah
 - d) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - e) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a). Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - b). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a). Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat daerah Kecamatan Matesih

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah dae rah	Kec. Matesih	100	2.256.904.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	2.665.051.800
7.01.01.2.01	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Matesih	5 Keg	5.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		5 Keg	7.000.000
7.01.01.2.02	administrasi keuangan	Cakupan administrasi keuangan	Kec. Matesih	12 Bulan	1.714.646..000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Bulan	2.234.012.110
7.01.01.2.06	administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kec. Matesih	12 Bulan	65.980.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Bulan	153.559.690
7.01.01.2.08	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	12 Bulan	161.800.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Bulan	180.480.000

7.01.01.2.09	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	12 Bulan	22.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		12 Bulan	68.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	Kec. Matesih	100	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	7.000.0000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kec. Matesih	2 Keg	2.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Keg	7.000.0000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Matesih	100	17.720.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	20.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Matesih	1 Keg	5.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Keg	10.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Matesih	1 Keg	12.720.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Keg	18.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Matesih	100	235.840.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	46.750.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya	Cakupan Koordinasi	Kec.	12 Bulan	235.840.000	Dana Transfer		12 Bulan	46.750.000

	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Matesih			Umum Dana Alokasi Umum			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Matesih	100	23.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	34.500.000
7.01.05.2.01	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Matesih	4 Keg	23.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		4 Keg	34.500.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Matesih	100	9.100.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		100	14.000.000
7.01.06.2.01	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Matesih	9 Desa	9.100.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		9 Desa	17.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMTAN MATESIH

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,035,844,000		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,000,000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,714,464,000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	1,714,464,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							64,700,000		

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	4,000,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	16,590,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah penyediaan bahan logistik	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	3,530,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	8,000,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	1,980,000	

7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah penyediaan bahan pembersih dan alat pembersih	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	25,600,000	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,970,000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana-prasarana gedung kantor yang terbangun	1 lokasi			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	2,970,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176,040,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	25,800,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	150,240,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,670,000	

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	20,690,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	1 lokasi			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	51,980,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								2,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah survey kepuasan masyarakat dan legalisasi dokumen	12 bulan			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	2,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								5,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								5,000,000	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	9 desa			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								235,840,000	

7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								235,840,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah pembinaan wilayah dan linmas desa	9 desa			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	235,840,000	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								23,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								23,000,000	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan fasilitasi paskibraka tingkat kecamatan	9 desa			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	18,000,000	

7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah pembinaan FKUB dan kegiatan keagamaan serta sosial budaya lainnya	9 desa			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								21,820,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								21,820,000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan desa	9 desa			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	9,100,000	
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah pembinaan PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya	9 desa			Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan	12,720,000	
TOTAL													2,323,504,000	

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan kerja yang selaras dengan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Karanganyar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud, keinginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Matesih dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Karanganyar di Kecamatan Matesih

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Matesih. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Matesih ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan

relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Laporan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2022 yang telah dibuat bersama-sama untuk dapat diwujudkan bersama.

Karanganyar, 2021
BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

